

Eksistensi Cryptocurrency dalam Sistem Keuangan Modern: Studi Pustaka tentang Implikasi Bagi Kebijakan Moneter

Salman Nasution¹, Muhammad Al Gifari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini membahas eksistensi cryptocurrency dalam sistem keuangan modern serta implikasinya terhadap efektivitas kebijakan moneter. Latar belakang penelitian didasari oleh pesatnya pertumbuhan adopsi aset kripto di Indonesia dan global, yang di satu sisi meningkatkan inklusi keuangan, namun di sisi lain menghadirkan risiko serius berupa volatilitas harga, absennya underlying asset, serta anonimitas transaksi. Fenomena ini berpotensi mendesentralisasi kontrol otoritas moneter, sehingga instrumen konvensional seperti pengaturan suku bunga, pengendalian jumlah uang beredar, dan stabilitas nilai tukar menjadi kurang efektif dalam menjaga kestabilan makroekonomi. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Paradigma yang digunakan adalah konstruktivis, di mana realitas sosial-ekonomi dipandang sebagai hasil konstruksi yang dapat diinterpretasikan dari berbagai perspektif. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, laporan resmi lembaga keuangan, dan artikel ilmiah terkini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur yang sistematis, sedangkan analisis menggunakan kerangka ekonomi makro dengan penekanan pada teori Keynesian. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan perspektif akademik guna meminimalisasi bias interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi kripto secara langsung melemahkan efektivitas kebijakan moneter, karena sebagian besar aktivitas finansial berlangsung di luar sistem formal. Volatilitas harga dan anonimitas transaksi menciptakan risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional sekaligus memperbesar kerentanan inflasi. Pembahasan menegaskan bahwa meskipun kripto berkontribusi pada efisiensi transaksi dan inklusi keuangan, ia tetap menjadi disruptor struktural terhadap stabilitas makroekonomi. Kesimpulannya, eksistensi cryptocurrency menuntut otoritas moneter merumuskan instrumen regulasi yang adaptif, agar manfaat inovasi digital dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional di era keuangan modern.

Kata kunci: Cryptocurrency, Sistem Keuangan Modern, Kebijakan Moneter.

PENDAHULUAN

Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2025, jumlah konsumen aset kripto di Indonesia telah mencapai 13,71 juta orang, meningkat sekitar 3,0 persen dari Februari 2025 yang tercatat 13,31 juta orang. Jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai sekitar 280 juta jiwa pada 2025, maka penetrasi pemain aset kripto berada pada kisaran 4,9 persen dari total populasi nasional. Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun kripto belum menjadi instrumen investasi arus utama, pertumbuhannya cukup signifikan sebagai salah satu bentuk aset digital alternatif di luar instrumen keuangan konvensional (Respati & Arief, 2025). Lonjakan ini juga merefleksikan adanya pergeseran perilaku investasi masyarakat, di mana tingkat adopsi terhadap teknologi finansial semakin meningkat seiring dengan kepercayaan pasar yang relatif terjaga serta dukungan regulasi berupa perizinan entitas ekosistem kripto oleh OJK.

Pada Maret 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pemain aset kripto di Indonesia mencapai 13,71 juta orang dengan nilai transaksi Rp 32,45 triliun, setara sekitar 4,9 persen populasi nasional, yang menandakan adopsi kripto semakin signifikan meski masih fluktuatif. Studi Rahmawan & Mafruhat, menunjukkan kripto membawa dampak positif berupa

peningkatan akses layanan keuangan, efisiensi transaksi lintas batas, dan inklusi keuangan, namun juga memiliki risiko negatif seperti kejahatan siber dan instabilitas sistem moneter. Lonjakan transaksi kripto Indonesia hingga Rp 650,61 triliun pada 2024 memperlihatkan potensi pertumbuhan ekonomi digital sekaligus kerentanannya terhadap volatilitas. Oleh karena itu, meski OJK telah memperkuat regulasi melalui perizinan 22 entitas ekosistem kripto, fenomena ini menegaskan perlunya regulasi berbasis stablecoin dan integrasi dengan sistem keuangan nasional agar manfaat kripto dapat dioptimalkan sekaligus meminimalkan risiko sistemik.

Rizvi dan Ali, menekankan bahwa meningkatnya partisipasi investor Indonesia dalam aset kripto pada masa pandemi bukan sekadar fenomena spekulatif, melainkan strategi diversifikasi portofolio untuk mengurangi kerentanan terhadap volatilitas sektor ekuitas yang terdampak krisis global. Meskipun demikian, cryptocurrency memiliki keterbatasan fundamental yang berimplikasi serius terhadap stabilitas ekonomi. Karakteristiknya yang sangat fluktuatif mencerminkan absennya mekanisme penopang nilai seperti pada instrumen keuangan konvensional, sehingga eksposur risiko tetap tinggi bagi investor. Selain itu, tingkat anonimitas dan desentralisasi yang menjadi keunggulan teknologi blockchain justru membuka ruang bagi praktik pencucian uang dan pendanaan aktivitas terorisme, yang mengancam integritas sistem keuangan. Ketiadaan dukungan aset berwujud (*underlying asset*) juga menimbulkan dilema mengenai legitimasi nilai intrinsiknya, sebab harga kripto hanya bergantung pada dinamika permintaan dan kepercayaan pasar semata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cryptocurrency dapat berfungsi sebagai instrumen lindung nilai alternatif, keberadaannya juga menghadirkan tantangan sistemik yang menuntut pengawasan ketat serta kerangka regulasi yang lebih adaptif agar tidak menimbulkan risiko bagi stabilitas keuangan nasional.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana eksistensi cryptocurrency yang bersifat terdesentralisasi berpotensi mendisrupsi otoritas moneter dalam mengendalikan stabilitas makroekonomi. Karakteristik kripto yang tidak memiliki *underlying asset*, beroperasi lintas yurisdiksi, serta ditopang oleh mekanisme pasar yang sepenuhnya spekulatif menjadikannya instrumen finansial dengan risiko sistemik tinggi. Volatilitas harga yang ekstrem dan anonimitas transaksi tidak hanya mengancam efektivitas instrumen kebijakan moneter seperti pengendalian suku bunga dan jumlah uang beredar tetapi juga membuka celah bagi praktik pencucian uang serta *shadow economy* yang sulit diawasi regulator. Fenomena ini menimbulkan dilema fundamental: di satu sisi cryptocurrency dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mempercepat digitalisasi ekonomi, namun di sisi lain berpotensi melemahkan daya kendali bank sentral dalam menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Oleh karena itu, kajian akademik yang mendalam mengenai implikasi struktural cryptocurrency terhadap kebijakan moneter menjadi sangat penting, bukan hanya untuk mengisi kesenjangan literatur global, tetapi juga untuk merumuskan strategi regulasi adaptif yang relevan dengan konteks ekonomi Indonesia di era keuangan digital modern.

KAJIAN PUSTAKA

Eksistensi cryptocurrency dalam sistem keuangan modern telah menjadi isu strategis yang memunculkan perdebatan luas di kalangan akademisi, regulator, dan praktisi keuangan. Sebagai bentuk inovasi teknologi berbasis blockchain, cryptocurrency menawarkan potensi transformasi pada sistem moneter melalui peningkatan efisiensi transaksi, inklusi keuangan, dan diversifikasi instrumen investasi. Namun demikian, keberadaannya juga menghadirkan tantangan serius, terutama terkait volatilitas harga, risiko kejahatan finansial, serta keterbatasan otoritas moneter dalam mengendalikan arus likuiditas. Fenomena ini semakin relevan dalam

konteks perekonomian global yang tengah beradaptasi dengan percepatan digitalisasi dan ketidakpastian pasar, di mana cryptocurrency dapat berperan sebagai alternatif maupun disrupsi terhadap sistem keuangan tradisional. Oleh karena itu, kajian pustaka mengenai implikasi cryptocurrency terhadap kebijakan moneter menjadi penting, tidak hanya untuk memahami peluang yang ditawarkan, tetapi juga untuk mengidentifikasi risiko yang muncul serta merumuskan kerangka regulasi yang adaptif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan modern.

Rahmawan dan Mafruhah (2022), dalam kajiannya mengenai dampak cryptocurrency terhadap perekonomian Indonesia menegaskan bahwa adopsi aset digital ini semakin berperan dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan sekaligus membuka peluang diversifikasi investasi bagi masyarakat. Dari perspektif sistem keuangan modern, hal ini mencerminkan terjadinya transformasi signifikan dalam perilaku ekonomi, di mana cryptocurrency tidak hanya dipandang sebagai instrumen spekulatif, tetapi juga sebagai sarana alternatif dalam aktivitas transaksi dan investasi. Namun, penelitian mereka juga menggarisbawahi risiko volatilitas harga yang ekstrem serta potensi ketidakstabilan moneter akibat absennya kontrol otoritas pusat. Dalam konteks kebijakan moneter, temuan ini menegaskan bahwa eksistensi cryptocurrency berimplikasi pada berkurangnya efektivitas instrumen moneter konvensional, sehingga menuntut otoritas keuangan untuk merumuskan regulasi adaptif yang mampu menyeimbangkan antara inovasi finansial dan stabilitas sistemik.

Sementara itu, Ariatmanto, Sari, dan Mahdika (2022), dalam *Seminar Nasional Corisindo* menyoroti bagaimana cryptocurrency dapat dipahami sebagai disrupsi terhadap sistem moneter tradisional. Menurut mereka, kehadiran aset digital berbasis blockchain membawa konsekuensi terhadap peran bank sentral dalam menjaga kestabilan nilai mata uang, karena sifat desentralisasi kripto berpotensi melemahkan kontrol likuiditas yang menjadi instrumen utama kebijakan moneter. Dari sudut pandang sistem keuangan modern, fenomena ini menegaskan bahwa eksistensi cryptocurrency berada pada persimpangan antara peluang dan ancaman: peluang dalam mendorong efisiensi transaksi global dan inklusi keuangan, sekaligus ancaman karena membuka celah bagi pencucian uang, spekulasi ekstrem, dan risiko terhadap stabilitas makroekonomi. Oleh karena itu, literatur ini memberikan pemahaman mendalam bahwa kajian tentang implikasi cryptocurrency terhadap kebijakan moneter tidak bisa dilepaskan dari analisis atas dinamika inovasi teknologi keuangan serta respon regulatif yang menyertainya.

John Maynard Keynes dalam teori ekonomi makronya menekankan pentingnya peran pemerintah, khususnya melalui kebijakan fiskal dan moneter, dalam menjaga stabilitas perekonomian yang rentan terhadap siklus fluktuasi permintaan agregat. Keynes berargumen bahwa intervensi negara melalui instrumen suku bunga, pengaturan jumlah uang beredar, serta belanja publik diperlukan untuk mengendalikan inflasi, pengangguran, dan menjaga pertumbuhan ekonomi (Keynes, 2018; Monika Sutarsa & Andi Usmar, 2023). Dalam konteks penelitian berjudul *Eksistensi Cryptocurrency Dalam Sistem Keuangan Modern: Studi Pustaka Tentang Implikasi Bagi Kebijakan Moneter*, teori Keynes menjadi relevan karena munculnya cryptocurrency berpotensi mengurangi efektivitas instrumen moneter konvensional yang selama ini menjadi alat utama stabilisasi ekonomi. Sifat desentralisasi dan tidak adanya kontrol bank sentral atas cryptocurrency dapat melemahkan pengaruh kebijakan suku bunga atau regulasi likuiditas yang dijelaskan Keynes, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi otoritas moneter dalam mempertahankan stabilitas ekonomi makro. Dengan demikian, eksistensi cryptocurrency dapat dipandang sebagai faktor eksternal yang menuntut adaptasi teori Keynesian dalam menghadapi realitas keuangan digital modern.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Fokus utama penelitian diarahkan pada penelusuran dan analisis literatur akademik yang relevan terkait eksistensi cryptocurrency dalam sistem keuangan modern dan implikasinya terhadap kebijakan moneter. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif melalui analisis konseptual dan teoritis, tanpa terbatas pada data kuantitatif semata (Rita Fiantika et al., 2022).

Kerangka penelitian berlandaskan pada paradigma konstruktivis, di mana realitas sosial-ekonomi dipandang sebagai konstruksi yang dapat diinterpretasikan dari beragam perspektif ilmiah (M Chairul Basrun Umanailo, 2019). Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah bereputasi internasional dan nasional, buku akademik, laporan resmi lembaga keuangan (OJK, Bank Indonesia, IMF, BIS), serta artikel ilmiah terkini. Pemilihan sumber didasarkan pada kriteria relevansi topik, kredibilitas penulis atau institusi, serta kebaruan publikasi agar hasil kajian tetap aktual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses telaah literatur secara sistematis dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, dan mensintesis penelitian yang berkaitan dengan cryptocurrency dan kebijakan moneter. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan ekonomi makro, khususnya melalui kerangka teori Keynesian serta perspektif moneter modern. Analisis ini difokuskan pada keterkaitan antara karakteristik cryptocurrency seperti volatilitas, desentralisasi, dan absennya underlying asset dengan efektivitas instrumen moneter konvensional, termasuk pengendalian inflasi, suku bunga, dan likuiditas.

Untuk menjamin keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil analisis dari berbagai literatur, teori, dan perspektif akademik guna mengurangi bias interpretasi (Ascarya Academia, 2022). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan objektif. Selain itu, metodologi ini memberikan kontribusi akademik dengan menghadirkan perspektif baru terkait interaksi antara inovasi keuangan digital berbasis blockchain dan kebijakan moneter, sehingga dapat memperkaya literatur global sekaligus memberikan masukan strategis bagi regulator di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi Kripto dan Efektivitas Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Digital

Perkembangan cryptocurrency sebagai instrumen keuangan digital berbasis blockchain telah membawa implikasi signifikan terhadap otoritas moneter di berbagai negara. Sifatnya yang terdesentralisasi membuat kripto tidak berada di bawah kendali bank sentral maupun otoritas keuangan formal, sehingga menciptakan tantangan baru bagi efektivitas kebijakan moneter (Hartanto et al., 2023). Dalam konteks ekonomi digital modern, desentralisasi ini dapat melemahkan kemampuan bank sentral untuk mengatur likuiditas, mengendalikan inflasi, serta menstabilkan nilai tukar melalui instrumen konvensional seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka. Hal ini terjadi karena aliran dana dalam ekosistem kripto berlangsung secara global, lintas yurisdiksi, dan tidak tunduk pada mekanisme pengawasan tradisional. Dengan demikian, cryptocurrency menempatkan kebijakan moneter pada posisi yang lebih kompleks, di mana otoritas harus berhadapan dengan instrumen finansial baru yang sulit dikendalikan.

Lebih jauh, efektivitas kebijakan moneter dalam era digital sangat dipengaruhi oleh tingkat adopsi cryptocurrency di masyarakat. Semakin luas penggunaan kripto sebagai instrumen investasi maupun transaksi, semakin besar pula potensi terjadinya disintermediasi terhadap sistem keuangan tradisional. Kondisi ini dapat mengurangi daya ungkit kebijakan

moneter konvensional dalam mengendalikan perekonomian karena sebagian besar aktivitas finansial berlangsung di luar sistem formal. Walaupun cryptocurrency menawarkan manfaat seperti efisiensi transaksi dan perluasan inklusi keuangan, sifat volatilitas harga dan ketiadaan underlying asset justru memperbesar risiko ketidakstabilan makroekonomi. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai hubungan antara desentralisasi kripto dan efektivitas kebijakan moneter menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai pijakan strategis dalam merumuskan regulasi adaptif di tengah transformasi keuangan digital.

Tabel 1. Dampak Kripto terhadap Stabilitas Uang dan Ekonomi Digital

Aspek	Uraian Ilmiah
Latar Belakang	Cryptocurrency yang bersifat desentralisasi beroperasi di luar kontrol bank sentral, sehingga melemahkan kemampuan otoritas moneter dalam mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan stabilitas nilai tukar.
Mekanisme Desentralisasi	Transaksi kripto berbasis blockchain peer-to-peer tidak memerlukan lembaga perantara. Hal ini menciptakan ekosistem keuangan yang mandiri, namun sekaligus mengurangi efektivitas instrumen moneter konvensional.
Dampak terhadap Instrumen Moneter	<ol style="list-style-type: none"> 1) Suku bunga: bank sentral kehilangan sebagian pengaruh karena likuiditas beralih ke aset kripto. 2) Inflasi: volatilitas kripto berpotensi mengganggu stabilitas harga. 3) Nilai tukar: arus keluar-masuk modal via kripto dapat memicu fluktuasi mata uang domestik.
Risiko Struktural	Absennya underlying asset, volatilitas tinggi, dan sifat anonim memperlemah daya kendali kebijakan moneter serta membuka ruang bagi praktik pencucian uang, shadow economy, dan spekulasi ekstrem.
Implikasi dalam Ekonomi Digital	Di satu sisi, kripto mendorong inklusi keuangan dan efisiensi transaksi lintas batas. Namun di sisi lain, ia menjadi disrupsi bagi stabilitas makroekonomi karena mengurangi otoritas negara dalam pengendalian moneter.
Tantangan Regulator	Otoritas moneter harus mengembangkan regulasi adaptif seperti integrasi stablecoin, pengawasan transaksi kripto, serta koordinasi lintas lembaga agar dapat menjaga stabilitas moneter tanpa menghambat inovasi keuangan digital.

Eksistensi cryptocurrency yang bersifat desentralisasi menghadirkan tantangan serius bagi otoritas moneter. Tidak seperti mata uang konvensional yang dikendalikan oleh bank sentral, kripto beroperasi di luar jangkauan kontrol negara sehingga mengurangi kemampuan regulator dalam mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan stabilitas nilai tukar. Mekanisme blockchain peer-to-peer yang memungkinkan transaksi tanpa perantara memang menghadirkan efisiensi dan kemandirian dalam ekosistem keuangan, namun pada saat yang sama melemahkan efektivitas instrumen moneter konvensional yang selama ini menjadi pilar kebijakan ekonomi makro.

Dari perspektif instrumen moneter, cryptocurrency menimbulkan beberapa implikasi mendasar. Pertama, instrumen suku bunga yang biasanya menjadi alat utama bank sentral dalam mengendalikan permintaan agregat kehilangan sebagian pengaruhnya karena aliran likuiditas beralih ke aset kripto (Rahmawan et al., 2022). Kedua, volatilitas kripto yang ekstrem berpotensi mengguncang stabilitas harga dan memperumit upaya pengendalian inflasi. Ketiga, arus modal melalui transaksi kripto dapat memicu fluktuasi nilai tukar domestik, yang pada gilirannya mengganggu stabilitas sistem keuangan. Risiko struktural semakin diperparah oleh absennya underlying asset, sifat anonim, serta kecenderungan spekulatif kripto yang membuka ruang bagi praktik pencucian uang dan aktivitas ekonomi bayangan.

Meski demikian, kehadiran kripto tidak sepenuhnya negatif. Dalam konteks ekonomi digital, cryptocurrency berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi transaksi lintas batas, sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat yang sebelumnya belum

terjangkau layanan keuangan formal (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021). Namun, aspek positif ini dibayangi oleh perannya sebagai disrupsi terhadap stabilitas makroekonomi karena melemahkan otoritas negara dalam pengendalian moneter. Oleh sebab itu, regulator dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan kerangka regulasi adaptif misalnya melalui integrasi stablecoin, pengawasan lebih ketat terhadap transaksi kripto, dan koordinasi antar lembaga agar manfaat inovasi keuangan digital dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan stabilitas sistem moneter nasional.

Implikasi Struktural Kripto terhadap Stabilitas Keuangan dan Inflasi

Cryptocurrency memiliki karakteristik unik berupa volatilitas harga yang ekstrem, absennya underlying asset, serta tingkat anonimitas tinggi. Kondisi ini membuat kripto sulit diperlakukan sebagai instrumen keuangan yang stabil. Harga yang sangat fluktuatif mendorong spekulasi berlebihan dan menciptakan ketidakpastian pasar, sementara ketiadaan aset penopang nilai menjadikan kripto sepenuhnya bergantung pada kepercayaan publik (Priyo Nugroho Adi & Susana Ayu Handayani, 2021). Sifat anonimnya bahkan membuka ruang bagi praktik pencucian uang dan aktivitas ekonomi gelap, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan integritas sistem keuangan nasional.

Dalam konteks kebijakan moneter, fenomena ini memiliki implikasi serius terhadap efektivitas pengendalian inflasi. Instrumen moneter konvensional seperti pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar menjadi kurang efektif ketika sebagian likuiditas masyarakat beralih ke aset kripto yang berada di luar jangkauan regulasi bank sentral. Akibatnya, stabilitas makroekonomi dapat terganggu, karena inflasi lebih sulit dikendalikan dan sistem keuangan nasional rentan terhadap gejala eksternal. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai implikasi struktural cryptocurrency menjadi penting sebagai dasar penyusunan strategi regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital.

Tabel 2. Struktural Kripto terhadap Stabilitas Keuangan dan Inflasi

Aspek	Uraian Ilmiah
Volatilitas Harga	Fluktuasi nilai kripto yang ekstrem menciptakan ketidakpastian pasar, memicu spekulasi berlebihan, dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.
Absennya Underlying Asset	Tidak adanya aset penopang nilai menjadikan kripto sepenuhnya bergantung pada kepercayaan publik, sehingga rentan terhadap bubble dan sudden collapse yang dapat menular ke sektor keuangan lain.
Karakteristik Anonimitas	Sifat anonim dalam transaksi membuka ruang bagi praktik pencucian uang, pendanaan ilegal, dan shadow economy yang sulit dilacak regulator, sehingga mengancam integritas sistem keuangan nasional.
Implikasi pada Inflasi	Peralihan likuiditas ke aset kripto membuat instrumen moneter konvensional seperti suku bunga dan pengendalian uang beredar menjadi kurang efektif, sehingga menyulitkan otoritas dalam menjaga stabilitas harga.
Risiko Makroekonomi	Kombinasi volatilitas, ketiadaan underlying asset, dan anonimitas menciptakan risiko sistemik yang dapat melemahkan efektivitas kebijakan moneter, memperbesar kerentanan inflasi, serta mengganggu stabilitas makroekonomi nasional.

Volatilitas harga, absennya underlying asset, dan anonimitas transaksi menjadi faktor struktural utama yang membuat cryptocurrency berbeda dari instrumen keuangan konvensional. Fluktuasi harga kripto yang ekstrem mendorong ketidakpastian pasar dan aktivitas spekulatif yang berlebihan. Ketiadaan aset penopang nilai membuat harga kripto sepenuhnya bergantung pada kepercayaan pasar, sehingga rentan mengalami gelembung (bubble) dan kejatuhan mendadak (sudden collapse) yang bisa menular ke sektor keuangan lain. Sementara itu, sifat anonimitas dalam transaksi memberikan celah bagi praktik ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga munculnya shadow economy, yang pada akhirnya melemahkan transparansi dan integritas sistem keuangan nasional (Juwita* et al., 2023).

Implikasi dari karakteristik tersebut sangat nyata terhadap efektivitas kebijakan moneter. Peralihan sebagian likuiditas masyarakat ke aset kripto membuat instrumen konvensional seperti pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar menjadi kurang efektif.

Hal ini berdampak pada kemampuan bank sentral dalam menjaga stabilitas harga, khususnya dalam mengendalikan inflasi. Risiko makroekonomi pun meningkat karena kombinasi volatilitas, spekulasi, dan absennya pengawasan formal berpotensi menciptakan guncangan sistemik yang sulit dikendalikan oleh otoritas moneter. Dengan demikian, keberadaan kripto bukan hanya menjadi inovasi finansial, tetapi juga tantangan struktural yang menuntut kewaspadaan tinggi dari regulator (Puspitasari, 2023).

Oleh karena itu, kajian mengenai implikasi struktural cryptocurrency menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana ia mengancam efektivitas kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan nasional. Analisis yang komprehensif dapat membantu merumuskan strategi regulasi adaptif yang mampu menyeimbangkan antara manfaat inovasi finansial dan kebutuhan menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi di era digital.

Pembahasan

Hasil penelitian literatur menunjukkan bahwa eksistensi cryptocurrency dalam sistem keuangan modern menghadirkan dinamika yang kompleks bagi otoritas moneter. Di satu sisi, kripto berperan sebagai instrumen inovatif dalam transaksi digital dan perluasan inklusi keuangan. Namun di sisi lain, sifatnya yang terdesentralisasi, volatilitas harga, absennya underlying asset, serta anonimitas transaksi menimbulkan risiko yang signifikan bagi stabilitas sistem keuangan dan efektivitas kebijakan moneter. Kompleksitas ini menegaskan bahwa cryptocurrency tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan alternatif, tetapi juga sebagai fenomena struktural yang mengubah cara kerja sistem moneter di era digital (Baiquni et al., 2023).

Pada pembahasan subbab pertama, terlihat bahwa desentralisasi kripto secara langsung melemahkan efektivitas kebijakan moneter konvensional. Mekanisme blockchain peer-to-peer memungkinkan transaksi tanpa perantara, sehingga mengurangi pengaruh bank sentral dalam mengatur likuiditas, mengendalikan inflasi, dan menstabilkan nilai tukar. Semakin tinggi tingkat adopsi kripto, semakin besar pula risiko disintermediasi sistem keuangan tradisional, yang mengurangi daya ungkit instrumen moneter seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka. Hal ini menempatkan bank sentral pada situasi dilematis, karena kebijakan konvensional menjadi kurang efektif dalam menghadapi dinamika keuangan yang berlangsung di luar yurisdiksi formal (Jain et al., 2023).

Sementara itu, pembahasan pada subbab kedua menekankan pada implikasi struktural dari karakteristik kripto terhadap stabilitas keuangan dan inflasi. Volatilitas harga menciptakan ketidakpastian pasar, absennya underlying asset meningkatkan kerentanan terhadap bubble dan

sudden collapse, sementara anonimitas transaksi membuka ruang bagi pencucian uang dan shadow economy. Kombinasi faktor-faktor tersebut melemahkan instrumen pengendalian inflasi karena sebagian likuiditas masyarakat beralih ke aset yang tidak dapat diatur oleh otoritas moneter. Akibatnya, risiko makroekonomi meningkat dan stabilitas sistem keuangan nasional menjadi lebih rentan terhadap guncangan eksternal (Goel & Mazhar, 2024).

Jika dikaitkan dengan teori ekonomi makro John Maynard Keynes, kebijakan moneter memiliki peran penting dalam mengelola permintaan agregat melalui instrumen suku bunga, pengendalian uang beredar, serta intervensi terhadap stabilitas harga. Namun, keberadaan cryptocurrency mengurangi efektivitas mekanisme tersebut karena likuiditas dapat beralih ke pasar kripto yang berada di luar kontrol otoritas moneter. Dalam perspektif Keynesian, kondisi ini melemahkan fungsi kebijakan moneter dalam menjaga keseimbangan makroekonomi, khususnya dalam mengendalikan inflasi dan mencegah gejolak nilai tukar. Oleh karena itu, tantangan utama bagi otoritas moneter modern adalah bagaimana merumuskan instrumen baru yang mampu mengintegrasikan dinamika kripto tanpa kehilangan daya kendali terhadap permintaan agregat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Nur Indah Melani Aruan et al., 2023).

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai *Desentralisasi Kripto dan Efektivitas Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Digital* menunjukkan bahwa sifat desentralisasi cryptocurrency secara langsung mengurangi kendali otoritas moneter terhadap instrumen kebijakan konvensional. Transaksi yang berlangsung di luar sistem perbankan tradisional melemahkan kemampuan bank sentral dalam mengatur likuiditas, menjaga stabilitas nilai tukar, serta mengendalikan inflasi. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa kripto bukan hanya instrumen keuangan alternatif, melainkan juga kekuatan disruptif yang berpotensi mendesain ulang arsitektur sistem moneter di era digital.

Sementara itu, pembahasan mengenai *Implikasi Struktural Kripto terhadap Stabilitas Keuangan dan Inflasi* mengungkap bahwa volatilitas harga, ketiadaan underlying asset, serta sifat anonimitas transaksi menciptakan risiko serius bagi sistem keuangan nasional. Fluktuasi nilai yang ekstrem mendorong perilaku spekulatif, absennya penopang aset meningkatkan potensi bubble, dan anonimitas memperluas ruang bagi shadow economy. Kombinasi faktor ini menyebabkan instrumen pengendalian inflasi yang dimiliki otoritas moneter menjadi kurang efektif, sekaligus memperbesar kerentanan terhadap gejolak makroekonomi.

Dalam perspektif teori ekonomi makro John Maynard Keynes, kebijakan moneter seharusnya berfungsi mengelola permintaan agregat dan menjaga keseimbangan makro melalui instrumen seperti suku bunga dan pengendalian uang beredar. Namun, keberadaan kripto yang beroperasi di luar yurisdiksi bank sentral membuat mekanisme tersebut tidak lagi sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada bagaimana otoritas moneter perlu merumuskan strategi dan instrumen baru yang adaptif terhadap fenomena kripto, agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah disrupsi digital.

REFERENSI

- Ariatmanto, D., Sari, R., & Mahdika, Y. R. (2022). SLR Metode Paling Populer Prediksi Harga Cryptocurrency dengan Machine Learning dan Deep Learning. *Seminar Nasional Corisindo*.
- Ascarya Academia. (2022). Triangulasi Data, Contoh, Penjelasan Dan Prakteknya Pada Riset. *Ascarya Souldution*.
- Baiquni, M. I., Adiyatma, S. E., Rastini, & Waspiyah. (2023). Eksistensi Cryptocurrency dalam Pembentukan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Perspektif Ius Constituendum. *Media Iuris*, 6(3). <https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.38352>
- Goel, R. K., & Mazhar, U. (2024). Are the informal economy and cryptocurrency substitutes or complements? *Applied Economics*, 56(20). <https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2187039>
- Hartanto, S., Pratiwi, B. Y., & Ahmad, A. (2023). Pandangan sebelah mata tentang diskusi Akuntansi Uang Kripto (Cryptocurrency Accounting) di Indonesia. *Journal of Public and Business Accounting*, 3(1). <https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.286>
- Hilmawati, M. R. N., & Kusumaningtias, R. (2021). INKLUSI KEUANGAN DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP KINERJA DAN KEBERLANGSUNGAN SEKTOR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i1.33881>
- Jain, S., Sharma, C., Das, P., Shambhu, S., & Chen, H. Y. (2023). Blockchain and Cryptocurrency: A Bibliometric Analysis. *Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics*, 27(5). <https://doi.org/10.20965/jaciii.2023.p0822>
- Juwita*, R., Ramadhani, D. M., & Maris, A. W. I. (2023). The Determinants of Cryptocurrency Returns. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 12(2). <https://doi.org/10.34010/jika.v12i2.9461>
- Keynes, J. M. (2018). The General Theory. In *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70344-2_1
- M Chairul Basrun Umanailo. (2019). Paradigma Konstruktivis. *Metodologi Penelitian, October*.
- Mafruhat, A. Y., Rahmawan, B. A., & Robbani, N. A. (2022). DAMPAK CRYPTOCURRENCY TERHADAP SISTEM MONETER: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS. *Bina Ekonomi*, 26(2). <https://doi.org/10.26593/be.v26i2.5840.97-106>
- Monika Sutarsa, & Andi Usmar. (2023). EVOLUTION OF ECONOMICS MACRO. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(1). <https://doi.org/10.38204/ekobima.v1i1.2233>
- Nur Indah Melani Aruan, Irma Hutagalung, & Bonaraja Purba. (2023). ANALISIS DAMPAK TEORI KEYNES DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI MELALUI KEBIJAKAN FISKAL. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(1). <https://doi.org/10.62017/jimea.v1i1.78>
- Priyo Nugroho Adi, & Susana Ayu Handayani. (2021). ANALISIS DAMPAK INFORMASI MASSA PADA NILAI MATA UANG KRIPTO DI INDONESIA. *Science Technology and Management Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.53416/stmj.v1i2.16>
- Puspitasari, N. D. (2023). Pengaruh kebijakan moneter bank sentral terhadap kinerja keuangan bank umum. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 2(1). <https://doi.org/10.32503/jck.v2i1.3381>
- Rahmawan, B. A., Robbani, N. A., & Mafruhat, A. Y. (2022). Dampak Cryptocurrency

- Terhadap Sistem Moneter: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Bina Ekonomi*, 26(2).
- Respati, A. R., & Arief, T. M. V. (2025). *Pemain Aset Kripto di Indonesia 13,71 Juta Orang, Nilai Transaksi Capai Rp 32,45 Triliun*. Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2025/05/10/115800826/pemain-aset-kripto-di-indonesia-13-71-juta-orang-nilai-transaksi-capai-rp-32?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT. Global Eksekutif Teknologi* (Issue Maret).